



A TEKS ▾

[🏠](#) > [Opini](#) > [Politik Identitas dan Keadaban...](#)**POLITIK IDENTITAS**

Politik Identitas dan Keadaban Publik

Kebohongan makin marak di era Pasca-Kebenaran karena iklim sosial-politik membiarkan emosi memihak ke keyakinan mengalahkan obyektivitas dan rasionalitas. Mengapa keyakinan politik kerap tak dilandasi fakta obyektif?

Oleh **HARYATMOKO**

6 Desember 2022 04:30 WIB · 5 menit baca

Baca di Aplikasi



DIDIE SW

Ilustrasi

Situasi sosial-politik di Indonesia akhir-akhir ini mudah memicu polemik dan ketegangan karena gerak kelompok masyarakat tertentu yang cenderung menolak kebinekaan.

Dinamika di atas ditunjang perkembangan komunikasi digital, terutama media sosial (Facebook, Blog, SnapChat, Twitter, Tiktok, ataupun Youtube). Medsos adalah bentuk jurnalisme warga. Kendalinya lebih di tangan pengguna, yang tidak bisa dituntut seperti praktisi profesional.

Baca di Aplikasi



dan independensi.

Kebohongan semakin marak di era Pasca-Kebenaran karena "iklim sosial-politik membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan untuk mengalahkan obyektivitas dan rasionalitas, meskipun sebetulnya fakta menunjukkan hal yang berbeda" (Llorente, 2017: 9). Mengapa keyakinan politik sering tak mendasarkan pada fakta obyektif?

Medsos adalah bentuk jurnalisme warga. Kendalinya lebih di tangan pengguna, yang tidak bisa dituntut seperti praktisi profesional.

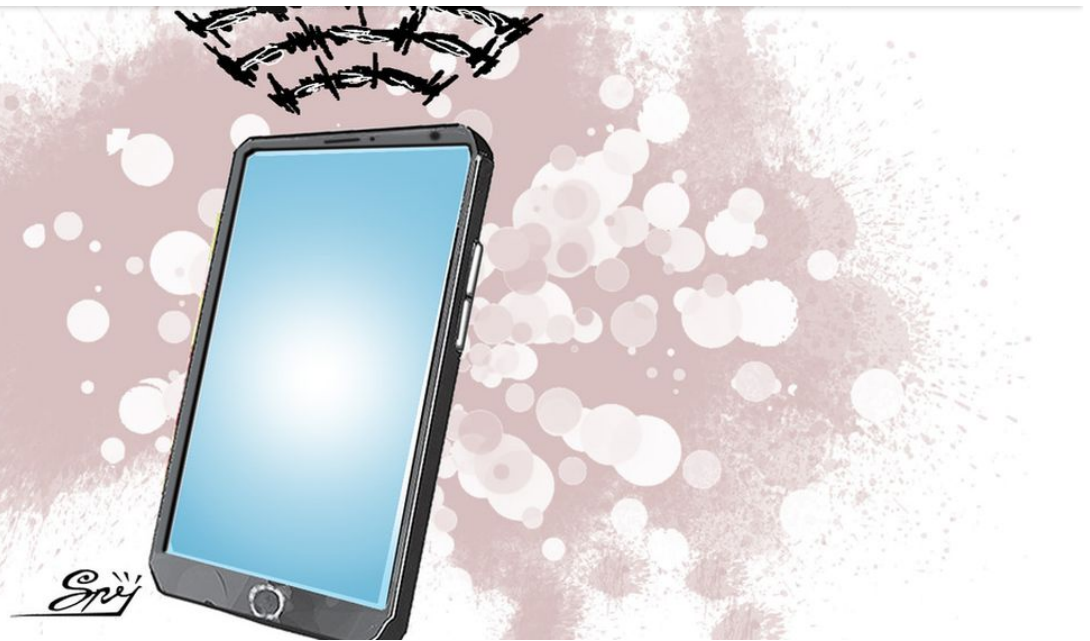
Emosi menentukan opini publik

J Haidt menyebutnya sebagai ilusi Muller-Lyer, keyakinan politik ditentukan oleh proses kognitif sederhana "melihat bahwa" yang hanya mengandalkan pada intuisi atau hasrat. Kalau fakta tidak sesuai dengan keyakinan, bukan pikiran yang harus direorganisasi agar berpijak pada fakta, tetapi justru fakta yang harus diubah.

Maka, hoaks marak, karena intuisi dan emosi lebih menentukan dalam menerima dan membentuk opini publik. Intuisi tidak otomatis mendorong untuk "berpikir mengapa". Padahal, hanya orang yang mulai "berpikir mengapa" bisa kritis terhadap hoaks. "Berpikir mengapa" membutuhkan kesadaran penuh dalam bernalar (2012).

Kebohongan dan wacana yang mengobok-obok emosi menyuburkan polarisasi masyarakat karena semakin meneguhkan keyakinan/ideologi setiap kelompok. Dengan ideologi, kelompok masyarakat semakin yakin akan kehebatan identitasnya.

Ideologi berfungsi meneguh¹ Baca di Aplikasi katkan kohesi sosial dan menafikan yang bukan kelompoknya.



Kebohongan di era Pasca-Kebenaran ditandai dimensi baru: (i) berkembang di masyarakat informasi ketika jurnalisme warga (medsos) menjamur sehingga terjadi demokratisasi media; (ii) prioritasnya lebih pada bagaimana "mengintensifkan prasangka negatif" dengan memanipulasi emosi masyarakat; (iii) audiens hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan ideologinya.

Lalu, fenomen *echo chamber* kian menggejala. Orang mencari peneguhan dari sesama pemeluk ideologi sehingga ketika gagasannya diulang-ulang, meski bohong atau keliru, karena gema terus didengar di ruang sama, akan dianggap benar. Melalui *echo chamber*, populisme agama mendapat angin karena agama semakin mudah digunakan sebagai legitimasi simbolik untuk menaklukkan ruang publik. Namun, populisme bisa juga menggunakan kendaraan sentimen kesukuan (Jawa/non-Jawa), terutama menghadapi Pilpres 2024.

Maka, politik identitas harus dipahami dalam kaitan dengan dua bentuk sentimen itu. Jangan heran "NKRI harga mati" pun bisa berubah menjadi politik identitas ketika secara membabi buta mendiskreditkan kelompok seberang. Menafikan kelompok seberang adalah unsur pokok mekanisme ideologi.

Baca di Aplikasi



Baca juga: [Tatanan Orde Baru Kekuasaan](#)

Keyakinan alergi verifikasi fakta

Populisme agama lebih mudah memikat banyak orang karena memberi kepastian daripada populisme yang berdasar sentimen kesukuan: (i) dalam ketidakpastian ekonomi global, pengangguran dan ketidakadilan, populisme agama menjamin ekonomi adil dan persaudaraan melalui revolusi moral.

Kemudian; (ii) agama memberi identitas politik yang pasti berkat retorika yang menjamin hidup akan sejahtera, bukan atas dasar analisis, tapi berdasarkan keyakinan. Karena keyakinan, orang tak peduli lagi dengan verifikasi fakta.

Masyarakat dikondisikan untuk mengabaikan verifikasi kebenaran. Kredibilitas informasi, pesan atau opini sering sudah tidak dipertanyakan lagi.

Kebohongan menyelinap masuk dengan mudah melalui kebingungan orang dalam membedakan antara berita, opini, fakta, dan analisis. Ujaran kebencian marak dengan berlindung di balik kedok kebebasan berpendapat.

Akibatnya, di dalam masyarakat Indonesia yang sudah terpolarisasi oleh ideologi, ketegangan dan konflik semakin mudah dipicu. *Buzzer* dan algoritma melanggengkan permusuhan dua kubu yang bersaing dan bermusuhan. Maka, bangsa ini perlu sadar untuk membangun keadaban publik.

Baca di Aplikasi

K



Keadaban publik

Keadaban publik mengandaikan sikap kritis dalam interaksi sosial. Artinya, peduli terhadap apa yang tak beres di masyarakat, seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, adu domba, bias jender, perundungan, dan politik identitas yang memecah belah. Maka, keadaban publik berarti kritis terhadap informasi dengan menganalisis sumber sebab dan kepentingan-kepentingan agar terbangun institusi-institusi yang lebih adil.

Kritis dalam menerima informasi mengandaikan kritis terhadap penggunaan bahasa. Maka, diperlukan analisis wacana kritis karena bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan memiliki berbagai konsekuensi. Melalui bahasa, fenomena yang sama bisa dideskripsikan dengan beragam cara: laporan, cerita harfiah, fiksi, representasi, atau virtual.

Perlu kejelian dalam membaca informasi karena informasi adalah interpretasi. Informasi sering dikemas dengan retorika, sarat dengan manipulasi, bahkan penyesatan. Dengan demikian, analisis wacana kritis merupakan upaya membangun etika komunikasi yang menjadi landasan keadaban publik.

Baca juga: [Turbulensi Politik](#) Baca di Aplikasi



mengambil keputusan yang tepat; (ii) membantu masyarakat mendapat informasi kredibel agar bisa ambil bagian dalam membangun komunitas yang lebih adil dan toleran.

Selain itu; (iii) mendorong komunikasi yang transparan dan akuntabel untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Dengan demikian, keadaban publik adalah bentuk keutamaan.

Keutamaan publik itu mengandaikan tiga unsur. Pertama, sikap hormat dan rasa cinta terhadap sesama warga negara yang melibatkan bentuk komunikasi penuh pengertian. Kedua, rasa empati yang mendorong menjadi warga negara kompeten, artinya mampu memahami hak-haknya dan hak-hak sesamanya untuk bisa memperjuangkan dengan mengorganisasi diri. Dan ketiga, menuntut kerelaan untuk mengorbankan diri atau kemampuan mengatur diri.

Keadaban publik mengandaikan kemampuan mengendalikan diri untuk tidak hanya mencari kepentingan diri demi menjaga harmoni masyarakat.

Maka, bertindak adil merupakan sikap pribadi rasional yang penuh hormat terhadap orang lain. Bertindak adil hanya mungkin apabila bersedia menunda mengejar kepentingan diri, berarti berkorban. Pengorbanan merupakan nilai moral yang menjadi dasar kuat bagi pranata sosial dan penataan sosial.

Haryatmoko *Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Komisi Kebudayaan*

Editor: **SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN**

Bagikan

politik identitas ideologi fenomena analisis ahli keadaban publik haryatmoko opini haryatmoko
pasca-kebenaran

Baca di Aplikasi



Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi **6 Desember 2022** di halaman 6 dengan judul "**Politik Identitas dan Keadaban Publik**".

BACA EPAPER KOMPAS

Komentar Pembaca

Belum ada komentar.

Artikel Terkait



Haedar Nashir: Bangun Keadaban Publik

21 November 2022

Baca di Aplikasi